

Fungsi dan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya

Latief Surjana

Alumni Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 West Java, Indonesia.

email: latiefsurjana@yahoo.com

Abstrak – Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Tasikmalaya dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian sumber data yang dipilih adalah kepala sekolah, pengurus komite sekolah, guru, siswa, alumni, dan orang tua siswa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah telah memahami fungsi dan peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah yang cukup baik dalam menganalisis, mengantisipasi permasalahan-permasalahan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan sekolah sehingga tujuan sekolah dapat dicapai. Komite sekolah cukup baik dalam menggalang dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Komite sekolah cukup baik dalam membina hubungan dengan masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tenaga pendidik, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Simpulan penelitian dapat dinyatakan bahwa komite sekolah punya peranan penting dalam memajukan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan meski banyak faktor, keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh komite sekolah ada faktor pendukung yaitu kerjasama yang baik antara sekolah dengan komite sekolah serta ketersediaan dana yang membiayai penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program adalah pembayaran dana komite sekolah yang tidak konsisten dengan kesepakatan pada rapat komite.

Kata Kunci : Peran, fungsi, mutu pendidikan

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bentuk satuan pendidikan kejuruan yang merupakan pendidikan vokasional yang mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga kerja tingkat menengah untuk siap kerja dalam bidang tertentu. Pemerintah menginginkan SMK menjalankan peran ujung tombak penyedia tenaga kerja nasional. Peran pendidikan SMK adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi kompetensi kejuruan, dengan kompetensi itu diharapkan lulusannya segera dapat terserap di lapangan kerja maupun mampu membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. Hal itu tertuang dalam tujuan penyelenggaraan pendidikan di SMK sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya.
- 2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.

- 3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. (Depdiknas, 2007)

Fenomena pasar kerja pada era globalisasi saat ini ditandai oleh semakin tingginya kompetisi untuk memperoleh kesempatan kerja. Dengan demikian lulusan SMK dituntut untuk menguasai kompetensi yang unggul dan siap pakai. Realitas ini perlu diantisipasi dengan peningkatan mutu pendidikan dalam proses yang baik. *Stakeholders* yang peduli terhadap mutu pendidikan diharapkan untuk lebih aktif bahkan proaktif sebagai penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan membayar uang sekolah saja, tetapi yang lebih penting adalah masyarakat diharapkan turut serta menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah turut bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan bermutu kepada peserta didik. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan advokasi yang mencetak tenaga kerja tingkat menengah sehingga antusias yang besar dari para orang tua siswa dan keinginan siswa untuk memperoleh pendidikan di SMK berharap setelah lulus akan dapat memasuki dunia kerja dari bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah.

Berdasarkan hal di atas, penelitian dengan judul fungsi dan peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya perlu diteliti. Komite sekolah dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat menampung dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Tasikmalaya dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya.

Partisipasi dapat berarti bahwa pembuat keputusan mengikut sertakan kelompok atau masyarakat luas terlibat dalam bentuk saran, pendapat, barang, ketrampilan, bahan atau jasa. Partisipasi dapat berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan sendiri, membuat keputusan dan memecahkan permasalahan mereka sendiri (Erdawati dalam Muhidin, 2008:1).

Bentuk partisipasi masyarakat antara lain: (a) kesamaan persepsi masyarakat dan pihak sekolah tentang pentingnya masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, (b) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan sekolah, (c) keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, (d) keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan penilaian dalam keberhasilan sekolah, (e) keterlibatan masyarakat dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan sekolah (Erdawati dalam Muhidin, 2008: 11).

Tujuan partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi: (a) memajukan kualitas belajar, (b) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, (c) meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat, (d) memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah, (e) mewujudkan tanggungjawab bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan (Erdawati dalam Muhidin, 2008: 1).

Bentuk dukungan partisipasi masyarakat (dunia industri) terhadap sekolah diantaranya adalah: (a) member masukan untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang mutakhir, (b) penyelenggaraan magang/praktik kerja industri/praktik kerja lapangan siswa, (c) pelaksanaan uji kompetensi siswa/evaluasi belajar, (d) rekrutmen tenaga kerja (Korneli dalam Muhidin, 2008:12).

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa komite sekolah berperan sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan seperti sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah memerlukan prinsip keterbukaan, demokratis, tercapainya hasil guna dan berdaya guna, cepat tanggap terhadap kondisi masyarakat, berwawasan ke depan, penegakan hukum, akuntabilitas,

keadilan, dan profesionalisme.

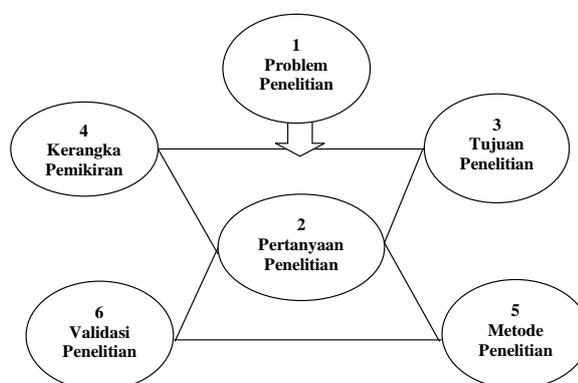
Komite sekolah untuk mengukuhkan kembali organisasinya maka harus mengadakan revitalisasi melalui tiga pendekatan yaitu pencapaian focus pasar, penciptaan bisnis baru dan pemanfaatan teknologi. Proses revitalisasi harus mengacu pada prinsip manajemen perubahan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus melakukan sosialisasi dan pembinaan agar komite sekolah mengetahui fungsi dan perannya selain itu komite sekolah mengetahui fungsi dan perannya.

Melihat fungsi dan peran komite sekolah sebagaimana di uraikan dalam undang-undang dan peraturan Pemerintah, maka peranan masyarakat untuk ikut memajukan kualitas pendidikan disatukan pendidikan sangatlah besar. Akan tetapi hal ini tergantung pada kemauan masyarakat sendiri, apakah mau berperan serta atau hanya sebagai pengguna jasa pendidikan sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

2. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi objek mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Tasikmalaya dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2010:15) "Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*naturalsetting*). Pendekatan kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*).” Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang nampak atau kelihatan.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik (*naturalistic research*), karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*).Disebut juga penelitian etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untukpenelitian bidang antropologi budaya. Selain itu disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan dianalisis lebih bersifat kualitatif. Adapun rancangan dari desain tersebut , seperti pada ilustrasi Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Metodologi yang Digunakan dalam Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Sementara itu berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya dengan ketua komite, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, perwakilan guru dan alumni diketahui bahwa peran komite sekolah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah. Perlu diketahui bahwa pihak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah membuat rancangan kerja dan anggaran sekolah setiap tahun yang sudah dikaji berdasarkan hasil analisis guna mewujudkan visi misi sekolah secara bersama yang dirumuskan pada rencana kerja dan anggaran sekolah. Komite sekolah memiliki fungsi memberikan pertimbangan terhadap segala kebijakan dan program yang telah dibuat oleh sekolah. Penyusunan program kerja telah dibuat oleh sekolah sehingga komite sekolah hanya memberikan pertimbangan program kerja dan juga menjalankan program yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah adalah dengan memberikan pertimbangan pada pihak sekolah SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya disesuaikan dengan perkembangan akan program sekolah dan bersama-sama membahasnya dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan program kegiatan sekolah. Selanjutnya pihak komite sekolah mengadakan rapat bersama dengan pihak sekolah untuk menyalurkan hasil rancangan kerja dan anggaran sekolah yang sudah dibahas bersama sesuai dengan program sekolah dan dipertanggungjawabkan serta dikoordinasikan hasilnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaannya.

3.2 Pembahasan

A. Peran Komite Sekolah Dalam Penyusunan Rencana Kerja/Anggaran Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komite sekolah telah memahami fungsi dan peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah yang cukup baik dalam menganalisis, mengantisipasi permasalahan-permasalahan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan sekolah sehingga tujuan sekolah dapat dicapai. Adapun peran komite sekolah tersebut dapat terlihat dari beberapa fakta yang ditemukan antara lain :

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), komite sekolah belum aktif terlibat, hanya sebagai pemberi pertimbangan dan memberikan masukan program yang perlu direvisi atau dibiarkan dan mengacu pada pelaksanaan program-program tahun anggaran sebelumnya. Bahkan untuk melanjutkan program, komite sekolah hanya memberikan apakah tetap dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Peran komite sekolah ini sesuai dengan lampiran II Kemendiknas 044/U/2002 tentang peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan.

B. Usaha Komite Sekolah Dalam Menggalang Dana Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komite sekolah cukup baik dalam menggalang dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Sebagai payung hukumnya dalam menggalang dana dari masyarakat komite sekolah berlandaskan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sangat clear. Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

C. Upaya Komite Sekolah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Masyarakat dan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komite sekolah cukup baik dalam membina hubungan dengan masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tenaga pendidik, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah.

Di era demokrasi dan partisipasi, transparansi serta akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, namun saat ini semua komponen itu harus berlaku menyeluruh dalam segala sektor, termasuk dalam manajemen sektor publik. Menurut Bastian (2001) dalam Halim (2008) menyebutkan bahwa sektor publik adalah bidang yang membicarakan metoda manajemen negara. Entitas Sekolah dan Komite Sekolah merupakan entitas Sektor Publik yang secara prinsip adalah organisasi yang mengelola uang dan keuangan negara, yang harus dipertanggungjawabkan secara keuangan negara.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai deskripsi fungsi dan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan (studi kasus di SMK Negeri 2 Tasikmalaya dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya), maka dapat disimpulkan beberapa hal berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian. Berikut akan diuraikan beberapa kesimpulan penelitian diantaranya : 1. peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah di kedua sekolah cukup baik terkait dengan kemampuan komite sekolah dalam menganalisis, mengantisipasi permasalahan-permasalahan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan semua yang timbul dari ajuan rancangan rencana kerja dan anggaran sekolah yang diajukan pihak sekolah, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai, 2. usaha komite sekolah dalam menggalang dana masyarakat di kedua sekolah cukup baik terkait dengan kemampuan komite sekolah dalam mengusahakan menggalang

dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan sekolah, 3. upaya komite sekolah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah di kedua sekolah cukup baik terkait dengan kemampuan upaya komite sekolah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah serta dapat menjalin komunikasi dengan dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan sekolah, 4. faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program komite sekolah di kedua sekolah cukup baik terkait dengan kemampuan komite sekolah dalam memajukan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan meski banyak faktor untuk menuju itu semua. Di era demokrasi dan partisipasi, komite sekolah mampu melakukan transparansi serta akuntabilitas pendidikan dalam pelaporan hasil kegiatan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Renika Cipta. 370 hlm.
- Arikunto, Suharsimi & Lia Yuliana. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jogyakarta : Aditya Media.Yogyakarta. 402 hlm.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 274 hlm.
- Fattah, Nanang. 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 163 hlm.
- Hadis, Abdul& Nurhayati. 2010. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung :Alfabeta. 128 hlm.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Miles, B.M& Huberman, M.A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Rohadi,R.T. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, 2014.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-32,Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya. 410 hlm.
- Muhidin, Ali Sambas. 2010. *Partisipasi Dunia Usaha dan Dunia Industri*. Industri.html.
- Mujtahid. 2010. *Pemberdayaan Komite Sekolah*. (Online). [http: Mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/pemberdayaan-komite- sekolah.html](http://Mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/pemberdayaan-komite-sekolah.html). diakses 6 April 2017.
- Mulyasa, E. 2006. *Manajeme Berbasis Sekola Konse Strategis dan Implementasi*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Pantjastuti, Sri Renani, dkk. 2009. *Resensi: Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. (Online).[http: guru.fkip.uns.ac.id](http://guru.fkip.uns.ac.id). diakses 5 April 2017.
- Satori & Komariah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke -6,.Bandung : Alfabeta. 274 hlm
- Satori, 2016.*Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Cetakan ke-2,.Bandung : Alfabeta. 272 hlm
- Suhardan, 2014.*Supervisi Profesional*.Cetakan ke-5,. Bandung : Alfabeta. 236 hlm.

